

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang masalah**

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara tidak sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utama dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Hal ini berarti bahwa pembangunan senantiasa beranjak dari suatu yang keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan nasional suatu bangsa. Pembangunan nasional yang berlandaskan pemerataan pembangunan dan hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini nampaknya sederhana. Tetapi seringkali terlupakan oleh kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang.<sup>1</sup>

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai suatu proses untuk perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk melalui upaya-upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar dapat sepenuhnya berpartisipasi di segala bidang pembangunan (United

---

<sup>1</sup> Human Development Indeks, *Pengertian Manusia*, www.Undp.com. (diakses pada tanggal 15 Mei 2013), hal 16

Nation Development Programme, UNDP). Arti penting manusia dalam pembangunan adalah manusia dipandang sebagai subyek pembangunan yang artinya pembangunan dilakukan memang bertujuan untuk kepentingan manusia atau masyarakat.

Pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, lebih dari sekedar peningkatan pendapatan dan lebih dari sekedar proses produksi komoditas serta akumulasi modal. Alasan mengapa pembangunan manusia perlu mendapat perhatian adalah: pertama, banyak negara berkembang termasuk Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi, tetapi gagal mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan. Kedua, banyak negara maju yang mempunyai tingkat pendapatan tinggi ternyata tidak berhasil mengurangi masalah-masalah sosial, seperti: penyalahgunaan obat, AIDS, alkohol, gelandangan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga, beberapa negara berpendapatan rendah mampu mencapai tingkat pembangunan manusia yang tinggi karena mampu menggunakan secara bijaksana semua sumber daya untuk mengembangkan kemampuan dasar manusia.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bulan September 2000, sebanyak 189 negara anggota PBB yang sebagian besar diwakili oleh kepala pemerintahan sepakat untuk mengadopsi Deklarasi Milenium. Deklarasi ini menghimpun komitmen para pemimpin dunia yang tidak pernah ada sebelumnya untuk menangani isu perdamaian, keamanan, pembangunan, hak asasi dan kebebasan fundamental

dalam satu paket. Dalam konteks inilah, negara-negara anggota PBB kemudian mengadopsi Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs). Setiap tujuan memiliki satu atau beberapa target beserta indikatornya. MDGs menempatkan pembangunan manusia sebagai fokus utama pembangunan (oleh karena itu nilai IPM/HDI merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu negara dalam melaksanakan MDGs), memiliki tenggat waktu dan kemajuan yang terukur.<sup>2</sup>

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia, UNDP telah menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. IPM adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf (*literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup. Ketiga indikator tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, selain itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah sehingga IPM akan meningkat apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan dan

---

<sup>2</sup> Prasetyo, H. *Millenium Development Goals (mdgs)*, Januari 2010, p.1. (<http://h-prasetyo.blogspot.com/2010/01/millennium-development-goals-mdgs-pada.html>), diakses pada tanggal 7 april 2013 pukul 14.35

nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. (*United Nation Development Programme, UNDP, 1990*).<sup>3</sup>

**Tabel I.1**  
**IPM (Indeks pembangunan Masyarakat) adalah Data IPM tahun 2007-2010**

Provinsi	2007	2008	2009	2010	Rerata
DKI Jakarta	76.59	77.03	77.36	77.60	77.15
Sulawesi Utara	74.68	75.16	75.68	76.09	75.40
Riau	74.63	75.09	75.60	76.07	75.35
Yogyakarta	74.15	74.88	75.23	75.77	75.01
Kalimantan Timur	73.77	74.52	75.11	75.56	74.74
Papua Barat	67.28	67.95	68.58	69.15	74.37
Nusa Tenggara Timur	65.36	66.15	66.60	67.26	66.34
Nusa Tenggara Barat	63.71	64.12	64.66	65.20	64.42
Papua	63.41	64.00	64.53	64.94	64.22
Indonesia	<b>70.31</b>	<b>70.88</b>	<b>71.40</b>	<b>71.86</b>	

Sumber: BPS (badan pusat statistic), tahun 2007-2010

Berdasarkan table I.1 diketahui bahwa IPM di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Rata-rata IPM tertinggi dimiliki oleh DKI Jakarta sebesar 77.15. Sedangkan rata-rata IPM terendah dimiliki oleh papua yaitu sebesar 64,22. IPM di Indonesia pun mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Di tahun 2007 IPM Indonesia sebesar 70,31 meningkat menjadi 70,88 pada tahun 2008. Pada tahun 2009 IPM Indonesia meningkat menjadi 71,40. Dan pada tahun 2010 meningkat hingga 71,86.

Namun fakta menunjukkan bahwa nilai IPM Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan nilai IPM negara-negara ASEAN lainnya

<sup>3</sup> UNDP, *Human Development Report*, (New York: Oxford University Press, 1990), p.94

kecuali Laos, Kamboja, dan Myanmar. Tabel I.1 memperlihatkan IPM Indonesia terus meningkat, namun peningkatan ini ternyata masih jauh dari tujuan mensejahterakan masyarakat. Capaian prestasi pembangunan manusia Indonesia sudah tertinggal jauh dibanding negara-negara tetangga, yaitu di bawah Singapura, Brunei, dan Malaysia yang sudah masuk pada kategori *High Human Development*, sementara Indonesia masih pada kategori *Medium Human development*. Kondisi ini secara langsung juga menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia masih relatif rendah.

**Tabel I.2**  
**PERINGKAT PEMBANGUNAN MANUSIA NEGARA ASEAN**  
**TAHUN 2007**

<b>Negara</b>	<b>Peringkat</b>	<b>HDI</b>	<b>Kategori</b>
Singapura	25	<b>92.2</b>	<i>High Index</i>
Brunai	30	<b>89.4</b>	<i>High Index</i>
Malaysia	63	<b>81.1</b>	<i>High Index</i>
Thailand	78	<b>78.1</b>	<i>Medium Index</i>
Filipina	90	<b>77.1</b>	<i>Medium Index</i>
Vietnam	105	<b>73.3</b>	<i>Medium Index</i>
Indonesia	107	<b>70.3</b>	<i>Medium Index</i>
Laos	130	<b>60.1</b>	<i>Medium Index</i>
Kamboja	131	<b>59.8</b>	<i>Medium Index</i>
Myanmar	132	<b>58.3</b>	<i>Medium Index</i>

Sumber: UNDP, 2008 dalam Kuncoro, 2010:149

Konsep HDI sesungguhnya masih dapat digunakan dan dimanfaatkan, apalagi dibarengi dengan ukuran-ukuran ekonomi tradisi seperti GDP perkapita. Tiga criteria HDI, yakni ketahanan hidup yang diukur berdasarkan Harapan hidup saat kelahiran. Pendidikan yang diukur dari pengetahuan yang dihitung berdasarkan tingkat rata-rata melek huruf dikalangan penduduk dewasa, dan rata-rata masa sekolah dan kualitas hidup fisik atau kualitas

standar hidup yang diukur dari pendapatan perkapita riil. serta kemampuannya dalam mengungkapkan aspek-aspek penting pembangunan seperti distribusi pendapatan, distribusi kesejahteraan berdasarkan jenis kelamin, kelompok etnik, atau kawasan yang terlalu penting untuk diabaikan.<sup>4</sup>

Usaha untuk meningkatkan IPM di Indonesia, terdapat permasalahan yang membutuhkan perhatian, yaitu permasalahan rendahnya produktivitas masyarakat Indonesia. Rendahnya produktivitas masyarakat secara akumulatif pasti akan berimbas pada pencapaian PDB (Produk Domestik Bruto) atau memperlambat akselerasi pertumbuhan yang berujung pada rendahnya pembangunan manusia di Indonesia<sup>5</sup>. Jika dilihat pada tataran masyarakat daerah, tingkat produktivitas dapat dilihat dari PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

Pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diperlukan guna mempercepat struktur perekonomian yang berimbang dan dinamis bercirikan industri yang kuat dan maju, pertanian yang tangguh serta memiliki basis pertumbuhan sektoral yang seimbang. Pertumbuhan ekonomi juga diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi kesenjangan sosial ekonomi.

---

<sup>4</sup> Todaro, Michael. *Pembangunan Ekonomi*. (Jakarta: Erlangga, 1998) hal 80

<sup>5</sup> <http://www.apakabar.ws/forums/viewtopic.php?f=1&2=48941> akses 25 april 2014

**Tabel I.3**  
**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto**  
**Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi, 2007 - 2010**  
**(Persen)**

Provinsi	Tahun				Rata-rata
	2007	2008	2009	2010	
DKI Jakarta	6.44	6.23	12.59	14.22	<b>9.87</b>
Riau	1.91	5.65	16.47	12.14	<b>9.04</b>
Sulawesi Tengah	7.99	9.96	7.71	8.74	<b>8.60</b>
Bali	5.92	10.27	5.33	5.83	<b>6.84</b>
Kepulauan Bangka Belitung	3.14	3.20	2.14	5.99	<b>3.62</b>
Nusa Tenggara Barat	3.71	1.62	2.38	6.35	<b>3.52</b>
Papua	2.94	-1.40	6.50	-3.19	<b>1.21</b>
Aceh	-2.36	-5.24	-5.51	1.34	<b>-2.94</b>
<b>Jumlah 33 Provinsi</b>	<b>5.47</b>	<b>5.52</b>	<b>5.58</b>	<b>6.23</b>	

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik), Pertumbuhan Ekonomi 2007-2010

Berdasarkan data laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2007-2010 mengalami fluktuasi disetiap provinsi pertahunnya. Misalnya di provinsi DKI Jakarta yang pada tahun 2007-2008 mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,21%. Namun pada tahun 2009 mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,37% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2007-2009 di provinsi Aceh, pertumbuhan ekonomi sempat mengalami penurunan drastis dibandingkan dengan provinsi lainnya. Seperti pada tahun 2009, pertumbuhan ekonomi di Aceh sebesar -5,51%. Hal ini terjadi karena dampak dari terjadinya musibah Tsunami diprovinsi tersebut hingga “mematikan” perekonomian di Aceh.

Pertumbuhan ekonomi harus dikombinasikan dengan pemerataan hasil-hasilnya. Pemerataan kesempatan harus tersedia, baik semua orang,

perempuan maupun laki-laki harus diberdayakan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi kehidupan mereka. Adanya realitas kesenjangan distribusi pendapatan atas sumber daya merupakan dampak dari proses pembangunan yang tidak merata. Pembangunan sarana dan prasarana umumnya lebih diutamakan untuk daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Sehingga dapat juga dikatakan bahwa ketimpangan antardaerah erat kaitannya dengan ketimpangan penyebaran penduduk. Daerah-daerah yang padat penduduk dan dengan sarana/prasarana yang memadai akan menjadi pusat kegiatan ekonomi, akibatnya penyebaran kegiatan ekonomi menjadi tidak merata dan berdampak pada kesenjangan pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan antardaerah. Perbedaan laju pertumbuhan antardaerah ini akan menyebabkan terjadinya kesenjangan kemakmuran dan kemajuan antardaerah.

Peran Pemerintah dalam sektor pendidikan pada umumnya mengalami kenaikan, namun masih dibawah pengeluaran pemerintah pada sektor industri, perumahan, dan pemukiman.serta sektor lainnya.<sup>6</sup> Jelas ini mendeskripsikan bahwa pemerintah Indonesia masih kurang perhatian dalam sektor pendidikan.

Ranah pembangunan manusia melalui sektor pendidikan turut dipertimbangkan, karena melalui pendidikan manusia mengalami sebuah proses. Proses tersebut dilalui oleh manusia untuk meningkatkan ilmu, pengetahuan, kemampuan/keahlian, meningkatkan kreativitas ataupun

---

<sup>6</sup> [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id) Diakses pada 4 mei 2014

inovasi yang keseluruhannya dapat meningkatkan harkat dan martabat setiap individu. Pendidikan terlihat sebagai investasi sumber daya saat ini untuk mendapatkan *return* dimasa depan. Apabila kualitas sumber daya manusia tersebut rendah yang tercermin adalah tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah pula yang tentunya berpengaruh juga pada pembangunan manusia.

Senada dengan ranah pemikiran Schultz berargumentasi bahwa:

pengetahuan dan skill adalah bentuk dari capital yang akan menghasilkan “deliberat investment”. Investasi dalam pendidikan formal, training, dan kesehatan akan meningkatkan kesempatan dan pilihan bagi individu, yang akan mempengaruhi kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang produktif.

Oleh karena itu, salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pembangunan manusia adalah aspek pendidikan pada manusia.

**Tabel I.4**  
**Realisasi Anggaran Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan di Indonesia**  
**Tahun 2007**

	<b>Provinsi</b>	<b>2007</b>	<b>persentase</b>
1	Jawa Barat	3,884,675,994,700	89.69%
2	Jawa Timur	3,544,001,030,900	95.02%
3	Jawa Tengah	3,181,227,883,300	96.35%
4	Sumatera Utara	1,719,258,915,200	97.23%
5	Banten	1,407,849,317,300	94.08%
6	Sulawesi Selatan	1,203,174,624,000	93.10%
7	DKI Jakarta	1,170,233,546,800	88.06%
8	Gorontalo	196,667,385,300	92.40%
9	Papua Barat	146,900,818,700	92.05%
10	Kepulauan Bangka Belitung	127,056,846,900	92.13%
11	Sulawesi Barat	117,158,962,400	91.56%
12	Kepulauan Riau	112,419,535,000	90.85%

Sumber: Data Realisasi Anggaran, KEMENDIKBUD

Berdasarkan data pada table I.4, dapat dilihat bahwa pada tahun 2007, realisasi anggaran pengeluaran pemerintah untuk pendidikan tertinggi diterima oleh provinsi Jawa Barat, kemudian diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sedangkan daerah yang mendapatkan realisasi anggaran pengeluaran pemerintah sektor pendidikan diterima oleh provinsi Kepulauan Riau. Namun pada kenyataannya, anggaran yang terealisasi disetiap provinsi kurang dari 100% setiap tahunnya, yang artinya setiap tahun dan setiap provinsi memiliki sisa dana yang belum tersalurkan.

Pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai cerminan kebijakan yang di ambil oleh pemerintah dalam suatu wilayah. Kebijakan pemerintah dalam tiap pembelian barang dan jasa guna pelaksanaan suatu program mencerminkan besarnya biaya yang akan dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan program tersebut. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai sektor-sektor publik yang penting, diantara kesemua sektor publik saat ini yang menjadi prioritas pemerintah dalam mencapai pembangunan kualitas sumber daya manusia dalam kaitannya yang tercermin dari indeks pembangunan manusia adalah investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan diharapkan Investasi pada sektor ini akan berpengaruh pada peningkatan kualitas SDM dan mengurangi kemiskinan. Pembangunan kesehatan dan pendidikan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia, yang antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam pengukuran IPM, kesehatan dan pendidikan adalah salah satu komponen utama selain pendapatan.

Kesehatan serta pendidikan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan merupakan dua dari beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan manusia. Kedua faktor tersebut, merupakan layanan jasa yang normatifnya disediakan oleh pemerintah, bukan bertumpu pada swasta terlebih pasar. Dalam hal peningkatan pembangunan manusia, pendidikan dan kesehatan yang baik bagi setiap manusia bisa terwujud melalui alokasi pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan meningkatnya alokasi pengeluaran pemerintah disektor tersebut maka akan meningkatkan prioduktivitas penduduk sehingga bisa meningkatkan pembangunan manusia. Untuk selanjutnya, pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan dapat disebut sebagai investasi publik.

Menurut World Bank, tingkat investasi publik di Indonesia masih merupakan terendah diantara negara-negara yang berpenghasilan menengah. Bahkan sejak terjadi krisis ekonomi investasi pada sektor publik ini cenderung menurun. Rendahnya tingkat investasi publik di Indonesia tersebut mencerminkan dari rendahnya alokasi pengeluaran pemerintah untuk sektor publik. Diantara sektor-sektor publik yang krusial bagi pembangunan kualitas sumber daya manusia adalah investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya mempunyai pengaruh terhadap pembangunan manusia.

Strategi pembangunan manusia di Indonesia merupakan upaya meningkatkan kesediaan akses bagi setiap individu guna memenuhi setiap kebutuhan hidupnya. Akses yang dimaksud adalah jangkauan yang dapat diperoleh oleh setiap individu guna melanjutkan kehidupan yang berkualitas. Masalah keterbatasan akses yang seringkali menjadi masalah mayoritas insan, adalah keterbatasan dalam pemenuhan akses dari sisi fisik dan non-fisik. Akses fisik berupa pemenuhan konsumsi setiap barang/benda, sedangkan akses nonfisik berupa jangkauan setiap individu terhadap telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Jangkauan pemenuhan akses bagi keberlanjutan kualitas hidup setiap manusia erat kaitannya dengan konsumsi, atau dengan kata lain terdapat tingkat konsumsi akan barang ataupun jasa yang harus dipenuhi oleh setiap individu sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dicirikan oleh adanya peningkatan harapan hidup yang sangat ditentukan antar lain oleh kualitas pangan yang dikonsumsinya. Salah satu bahan pangan yang sangat penting adalah pangan hewani dan nabati, yang merupakan sumber protein bagi kecerdasan, memelihara stamina tubuh.

Perolehan angka rata-rata konsumsi protein hewani masih dilihat pada *scope* nasional, jika angka statistik tersebut dapat lebih rinci lagi menggambarkan tingkat konsumsi protein hewani di setiap daerah di Indonesia, maka akan terlihat jelas ketimpangan antar provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, peran pangan asal hewani dan nabati sangat besar dalam

mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan lebih pintar (*healthier and brighter society*), yang pada akhirnya akan meningkatkan IPM.

Proses pendidikan yang berkesinambungan tanpa memihak satu golongan minoritas, peningkatan layanan dan tingkat kesehatan masyarakat dengan meningkatkan investasi publik melalui pengeluaran pemerintah, meningkatkan produktivitas masyarakat Indonesia, pemerataan akses,serta meningkatkan konsumsi masyarakat, merupakan beberapa cara yang efektif dan efisien guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia yang masih berada pada posisi memprihatinkan, jika dibandingkan dengan negara-negara di dunia.

Melihat beberapa paparan di atas, mengenai masalah kesejahteraan masyarakat yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti Pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap Indeks pembangaunan manusia di Indonesia.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan masalah tersebut, maka dikemukakan identifikasi masalah yang dapat mempengaruhi indeks pembangunan manusia yaitu sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia?
2. Apakah terdapat pengaruh antara kesenjangan distribusi pendapatan indeks pembangunan manusia?

3. Apakah terdapat pengaruh antara pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia?
4. Apakah terdapat pengaruh antara pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap kesenjangan distribusi pendapatan?
5. Apakah terdapat pengaruh antara pemerataan akses kepada masyarakat terhadap indeks pembangunan manusia?
6. Apakah terdapat pengaruh antara tingkat konsumsi masyarakat terhadap indeks pembangunan manusia?

### **C. Pembatasan Masalah**

Mengingat banyak dan kompleksnya permasalahan yang timbul serta hal ini tidak memungkinkan bagi peneliti untuk membahas semua masalah di dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi penelitian ini pada masalah “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan Terhadap IPM di Indonesia”

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka masalah penelitian yang dirumuskan adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh antara laju Pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh antara pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia?

3. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah – masalah yang telah peneliti rumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah mutlak :

1. Mengetahui besarnya pengaruh antara pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia
2. Mengetahui besarnya pengaruh antara pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia
3. Mengetahui besarnya pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Secara umum diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi semua pihak, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut :

1. Secara teoretis, penelitian ini dapat berguna untuk menambah referensi dan menambah sumber pengetahuan baru tentang pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia
2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan, masukan, serta referensi bagi peneliti selanjutnya, serta dapat

digunakan sebagai salah satu instrumen pemecahan masalah pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia.